

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Islam dan Negara selalu menjadi wacana menarik untuk dibicarakan. Di Indonesia sendiri, perdebatan tentang perlu atau tidak peran Islam dalam negara sudah dimulai sejak nagara belum didirikan. Dalam proses awal pembentukan negara Indonesia, persoalan paling krusial adalah menyepakati dasar Negara. Dalam sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) permasalahan pokok yang dibicarakan adalah persoalan bentuk Negara, batas Negara, dasar filsafat Negara dan hal-hal lain yang bertahan yang bertahan dengan pembuatan suatu konstitusi. Perdebatan tentang masalah-masalah di atas, kecuali tentang dasar filsafat Negara, berjalan dengan lancar. Untuk bentuk Negara misalnya, hampir seluruh anggota BPUPKI,<sup>1</sup> memilih bentuk republik. Tetapi sekali tentang dasar Negara disentuh, iklim politik dalam sidang menjadi hangat. Anggota menjadi dua kubu, kubu nasionalis dan kubu modernis-konservatif yang membela dasar Islam. Tokoh-tokoh terkemuka dari pihak nasionalis adalah Radjiman, Soekarno, Muhammad Hatta, Profesor Supomo, Muhammad Yamin, Wongsonegoro, Sartono, R. P. Suroso dan Dr. Buntaran Martoatmodjo. Semua tokoh ini adalah hasil didikan Barat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Anggota BPUPKI itu adalah Dr. Radjiman, Soekarno, Mohammad Hatta, Prof. Supomo, Moh. Yamin, Wongsonegoro, Sartono, R.P.Surono, Dr. Buntaran Martoatmodjo, Ki Bagus Hadikusumo, KH.Ahmad Sanusi, Kahar Muzakkar dan KH.Wachid Hasyim.

<sup>2</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir* (Jakarta: Teraju, 2002, vii-viii).

Dari kelompok pembela dasar Islam, juru bicara terkemuka adalah Ki Bagus Hadikusumo, KH. Ahmad Sanusi, Kahar Muzakar dan KH. A. Wachid Hasyim. Dalam kelompok ini pihak modernis dan konservatif bersatu menghadapi pihak nasionalis. Gagasan tentang suatu bentuk Negara berdasar Islam telah muncul ke permukaan, sejak Indonesia masih di bawah kekuasaan Jepang.

Setelah melalui diskusi panjang tentang di mana tempat Islam di dalam kehidupan bernegara. Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) itu berhasil mencapai kesepakatan bahwa Negara kita Republik Indonesia bukanlah sebuah Negara teokrasi, melainkan Negara yang di dalamnya Islam dan kehidupan ber-Islam mendapat tempat yang sangat terhormat dan dilindungi sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 UUD 1945.<sup>3</sup>

Tercapainya kesepakatan itu tidak lantas menjadi Polemik Negara Islam juga turut usai. Pada era Orde Baru hal ini memang bias diminimalisir dengan memberlakukan Undang-undang keormasan (UU No 8/1985), yang antara lain menetapkan keharusan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan (suatu kebijakan yang belum tercapai pada masa kepemimpinan Soekarno). Padahal dengan gagasan sekularisasinya hal ini pada masanya sepatutnya sudah harus terselesaikan. Pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal di sambut baik oleh kalangan pembaharuan Islam seperti Nurcholis Madjid dan Gus Dur (Abdurrahman Wahid). Mereka menepis anggapan sementara kalangan Islam yang melihat pemberlakuan UU ini akan mereduksi peranan Islam. Menurut Nurcholis

---

<sup>3</sup> *Ibid*

Madjid setelah pemberlakuan UU keormasan ini pemanfaatan simbolis formal Islam menjadi berkurang.<sup>4</sup> Tetapi bukan berarti hilang sama sekali.

Polemic yang ditekan kemunculannya di masa Orde Baru, mendapat momentumnya di orde reformasi sekarang ini. Dengan iklim politik yang lebih terbuka partai-partai berbasis Islam yang disinyalir kuat memiliki niat menegakkan dasar Negara Islam di Indonesia tumbuh subur bak jamur. Sementara itu partai-partai nasionalis yang merasa khawatir dengan kekuatan Islam ini berjuang keras tetap eksis dan berusaha mendapat simpati masyarakat dengan menggulirkan polemic Negara Islam, polemic itu kian memanas saat syari'at Islam ramai-ramai diakomodasikan dalam Perda (peraturan daerah) di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan hubungan Islam dan Negara tidak pernah usai. Meskipun UUD 1945 jelas-jelas mengatakan bahwa Negara Indonesia bukan Negara teokrasi, tetapi saja UUD itu tidak bias membendung kemunculan gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok baru yang lebih militan.

Pertanyaannya kemudian, dimanakah tempat Soekarno dalam polemic ini?. Menurut Nazaruddin Sjamsuddin Soekarno ibarat “sumur” kajian yang tidak akan pernah kering.<sup>5</sup> Termasuk tentang polemic Islam dan Negara. Soekarnolah yang mula-mula memunculkan wacana “pemisahan agama terhadap negara” ia jelas memiliki peranan penting bagi pembentukan wacana ini di Indonesia dulu hingga sekarang. Bermula dari polemiknya dengan M. Natsir yang berkenaan dengan bentuk Negara Indonesia setelah merdeka. Apakah agama (Islam) dan Negara bersatu atau

---

<sup>4</sup> M.Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), ix-x.

<sup>5</sup> Nazaruddin Sjamsuddin (ed), *Soekarno : Pemikiran Politik dan kenyataan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), viii.

pisah? Hukum Islam dan hukum positif yang dipergunakan? Soekarno dalam polemic ini banyak mengutip pendapat-pendapat yang pernah dilontarkan oleh tokoh-tokoh nasionalis Islam di Negara-negara Turki, India dan Timur Tengah. Dalam hal ini Deliar Noer berpendapat bahwa polemic tersebut pada hakikatnya adalah perbenturan dua nilai yang bertolak dari dua asas berfikir yang berbeda, Islam dan Barat. Natsir menyuarakan nilai-nilai Islam dan Soekarno pembawa nilai-nilai Barat.<sup>6</sup> Dan sejak saat itu polemik ini bermula dan akhirnya tidak hanya menjadi polemic antara Soekarno dan Natsir saja, tetapi telah menjadi polemic yang berskala nasional.

Puncak dialog ideologis tersebut terjadi pada masa penjajahan Jepang, saat mendekati kemerdekaan Indonesia, ketika wakil-wakil dari kelompok Islam dan kelompok nasionalis sekuler bertemu dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan inilah yang ditugaskan untuk merumuskan UUD, termasuk ideologi bangsa. Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 yang menguraikan rencana dasar Republik Indonesia kemudian didiskusikan dan berakhir dengan disepakatinya Piagam Jakarta. Keberhasilan merupakan hasil jerih payah Soekarno dalam rangka mencari bentuk kompromi antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis sekuler. Tetapi setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Akhirnya Hatta berhasil meyakinkan seluruh anggota PPKI bahwa yang suatu konstitusi “Sekuler” yang mempunyai peluang untuk diterima oleh mayoritas rakyat Indonesia. Dalam sidang ini anak kalimat yang tercantum dalam Piagam Jakarta, yang berkenaan dengan kewajiban untuk melaksanakan syari’at Islam bagi penduduk yang beragama Islam, tidak dimasukkan lagi dalam konstitusi.<sup>7</sup> Dan

---

<sup>6</sup> Lihat Deliar Noer, *Ideologi, Politik dan Pembangunan* (Jakarta: Yayasan perkhidmatan, 1993).

<sup>7</sup> P. Van Dick, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Grafitipres, 1983), 50

akhirnya dasar dan ideologi bangsa Indonesia ditetapkan adalah Pancasila, sesuai dengan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni tersebut dengan rumusan yang diperbaiki. Ini artinya gagasan Soekarno tentang sekularisme di Indonesia terealisasi.

Oleh karenanya tidak mungkin menghapus jejak Soekarno dalam sejarah pembentukan ideologi bangsa. Karena sebelum Negara ini terbentuk jauh-jauh hari ia telah memikirkannya, kemudian pemikirannya (sekularisme). Ia jadikan wacana dan melemparkannya ke publik. Sehingga saat Negara ini dibentuk, para *founding fathers* tidak kaget lagi dengan perdebatan yang sama. Yang pada akhirnya Soekarno dapat diterima semua kalangan baik kalangan religius maupun nasionalis, dan ia keluar sebagai pemenang. Bahkan ketika polemic itu muncul lagi akhir-akhir ini, beberapa tokoh masih menggunakan pemikiran Soekarno sebagai rujukan.

Sekularisme politik yang dipelopori Soekarno ini tidak akan pernah mati. Ia tetap hidup dan berkembang dalam dua level sekaligus. Level sosialisasi gagasan dan level implementasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan Negara terhadap Islam politik. Di masa setelah kematiannya pun (1970) gagasan sekularisme politik Soekarno tentang pemisahan agama dari Negara dan depolitisasi Islam tetap diberlakukan. Runtuhnya rezim Orde Lama Soekarno tidaklah secara otomatis mengubah kebijakan sekularisasi Soekarno terhadap Islam. Soekarno, penguasa Orde Baru dalam persoalan hubungan agama dan negara pada esensinya tetap mengimplementasikan kebijakan sekularisasi politik.<sup>8</sup> Dan pada orde reformasi meski polemic ini sengaja dimunculkan kembali, gagasan sekularisasi Soekarno tetap gagasan yang paling aman diterapkan di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam Soekarno Versus Natsir* (Jakarta : Teraju, 2002), 163.

Sayangnya pemikiran sekularisasi politik Islam Soekarno pada saat itu kurang diurai secara sistematis dan konseptualis (oleh karenanya baru pada masa Orde Barulah asas tunggal Pancasila baru bias diberlakukan, padahal seharusnya pada masa Soekarno sudah harus terealisasikan karena *grand mind* darinya). Menurut Nazaruddin hal demikian terjadi karena pada dasarnya Soekarno adalah tipe orang yang amat emosional, idealis dan tidak pragmatis. Ia sangat menyukai hal-hal besar dan bersifat agung. Lebih dari itu, ia yakin bahwa hanya dirinyalah yang akan dapat memberikan keagungan itu tanpa memperhatikan kondisi-kondisi lain disekitarnya. Sehingga dalam kepemimpinannya blok idealis lebih kuat dari pada kubu pragmatis.<sup>9</sup> Itulah kenapa Soekarno tidak terlalu peduli pada hal-hal detil, asal gagasannya bergulir dan terealisasikan ia sudah cukup puas.

Meskipun begitu pemikiran Soekarno tetap memukau anak-anak muda pada masanya. Seperti halnya Wajiz Anwar (alm) dosen filsafat di IAIN Sunan Kalijaga. Ia adalah alumni Pondok Modern Gontor, kemudian melanjutkan pelajarannya di Mesir. Ia amat mengagumi Soekarno. Baginya Soekarno adalah “”Mujaddin Islam terbesar di abad ke-XX, menurutnya apa yang dilakukan Soekarno tidak kalah dengan apa yang dilakukan pemikir-pemikir muslim dahulu kalau pemikir muslim dahulu berhasil mengawinkan filsafat Yunani dengan ajaran-ajaran Islam, maka Soekarno berhasil mengawinkan Marxisme dan Islam.<sup>10</sup>

Terlepas dari segala kontroversi tentang pribadi dan pemikiran Soekarno, pada gilirannya tentang sekularisme politik Islam tetap menjadi barometer bagi pemikiran politik Islam selajutnya. Dan bahkan pemikiran sekulernya mendapat pewarisnya,

---

<sup>9</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *Soekarno*....., 15.

<sup>10</sup> Djohan Effendi, “Kata Pengantar”, dalam Ahmad Wahib, *Pergolekan Pemikiran Islam : Catatan Harian* (Jakarta : LP3ES, 1981), 4.

dimana pewarisnya ini kemudian dikenal dengan eksponen pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Kalangan pembaharu inilah yang kemudian menguraikan pemikiran Soekarno secara sistematis, konseptualis, dan *sophisticated*, bahkan dilengkapi dengan argementasi teologis. Dimana dalam memberi landasan teologis bagi pemikirannya tidak mampu dilakukan Soekarno, karena keterbatasan pengetahuan agamanya. Dan ketidak mampuan Soekarno dapat dilengkapi oleh kelompok pembaharu ini. Yang paling gencar menyuarakan sekularisasi ini adalah Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Djohan effendi dan di era ini dapat kita temui pada pemikiran Ulil Absar Abdallah, Luthfi Assyaukanie dan Ahmad Sahal.

Soekarno akan tetap hidup dalam pemikiran mereka, bahkan pada pemikir-pemikir lain yang belum muncul atau akan muncul nanti. Pemikirannya melampui batas waktu dan ruang sehingga sampai sekarang pun masih layak dikaji guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa pada saat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan Soekarno tentang relasi Agama dan Negara?
2. Bagaimana posisi pemikiran Soekarno?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mendistribusikan pemikiran Soekarno tentang relasi Agama dan Negara
2. Untuk mengetahui posisi pemikiran Soekarno di antara pemikiran lain di Indonesia.

## D. Penjelasan Istilah

### 1. Agama

Agama berasal dari kata bahasa Sanskerta yang artinya haluan, peraturan jalan atau kebangkitan kepada Tuhan. Kata agama terdiri dari dua kata yaitu A berarti tidak, sedangkan GAMA artinya kacau balau, tidak teratur. Jadi agama berarti tidak kacau balau yang berarti berarti.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hidup beragama itu adalah hidup yang teratur, sesuai dengan haluan atau jalan yang telah dilimpahkan Tuhan dan di jiwai oleh semangat kebaktian kepada Tuhan.

Kata berikutnya yang juga perlu mendapat penegasan arti adalah kata *Islam*. Secara etimologis, kata *Islam* berasal dari bahasa Arab, dari bentuk kata *Salama* yang berarti selamat sentosa. Dari kata tersebut di bentuk kata *Aslama* yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat.<sup>11</sup>

Islam adalah Islam Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, guna diajarkan kepada seluruh umat manusia.<sup>12</sup>

Dalam konteks pemikiran politik Islam, dikenal istilah “*Islam cita-cita*” dan “*Islam histori*”. Yang *pertama* adalah Islam menurut Allah, dan hanya Allah yang mengetahui. Sedangkan manusia mustahil dapat mencapainya. Yang *kedua* adalah Islam yang menurut yang dipahami manusia, berdasarkan realitas yang ada.<sup>13</sup> Dalam penelitisn ini, kata Islam menurut pengertian yang kedua.

### 2. Negara

---

<sup>11</sup> Nasaruddin Rozak. *Dienul Islam* (Bandung : PT al-ma'arif,1996), 56.

<sup>12</sup> *Ibid.....*, 59

<sup>13</sup> Abdul Aziz Thoba. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), 86.



Yang terakhir adalah kata *Negara*. Istila *Negara* diterjemahkan dari bahasa asing: *staat* (bahasa Belanda dan Jerman), *state* (bahasa Inggris), *etat* (bahasa Prancis).<sup>14</sup> Berbeda dengan istilahnya yang permanent, mengenai konsep dan teori *Negara* masih belum terdapat kesepakatan bersama. Para teoritis berbeda pendapat, sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Menurut Miriam Budiardjo, setelah merujuk berbagai pendapat, menyimpulkan bahwa Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya di perintah oleh sejumlah pejabat (pemerintah) yang berusaha menuntun warga negaranya taat pada perundang-undangan melalui penguasaan control monopolis dari kekuasaan yang sah.<sup>15</sup>

Selain itu, ada yang mendefinisikan *Negara* sebagai pemerintah saja, yaitu lembaga pemerintahan. Barang kali di sini juga di masukkan lembaga militer dan kepolisian. Ada yang mendefinisikan *Negara* sebagai system pemerintahan. Jadi bukan saja lembaga *eksekutif*, tetapi juga lembaga *legislative*, *yudikatif*, militer dan kepolisian.<sup>16</sup>

## **E. Kajian Pustaka**

Pembahasan tentang Islam dan Negara sudah banyak dikaji oleh para tooh Islam dengan berbagai alasan. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan Islam dan Negara sangat menarik untuk dijadikan bahasan baik dari segi filsafat, politik, atau dari disiplin keilmuan lainnya. Dalam pembahasan maka penulis menampilkan beberapa hasil penelitian yang membahas tentang Islam dan Negara antara lain:

---

<sup>14</sup> F. Isjwara. *Pengantar ilmu politik* (Bandung : Bina cipta, 1980), 90.

<sup>15</sup> Meriam Budiardjo. *Dasar-dasar ilmu politik* (Bandung : Gramedia, 1982), 40.

<sup>16</sup> Aminuddin. *Kekuatan Islam dan pergulatan kekuasaan di Indonesia sebelum dan sesudah runtuhnya rezim Soeharto* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), 19-20.

Muhammad Iqbal, Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasah Jinayah, tahun 2002, IAIN Sunan Ampel Surabaya, tentang Islam dan Politik menurut pemikiran Soekarno. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa antara agama dan demokrasi dapat bersatu. Sebab tampaknya Soekarno melihat bahwa demokrasi modern tersebut memisahkan agama dari Negara dalam konstitusi dan itu sejalan dengan konsep nasionalismenya. Konsep demokrasi yang menjadi alasannya dalam hal ini menunjukkan kepada suara terbanyak. Ia mengatakan bahwa dengan konsep demokrasi tersebut, walaupun umat Islam dapat menerima dipisahkannya antara agama dan Negara, namun umat Islam dapat mengajukan usul agar hokum-hukum dan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh badan perwakilan, bagi anggota mayoritas umat Islam.

## **F. Sumber Penelitian**

Sumber penelitian dalam buku ini, dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

### **1. Sumber Primer**

Yang dimaksud dengan sumber primer dalam penelitian ini adalah karya-karya yang ditulis sendiri oleh tokoh yang diteliti, dalam hal ini Soekarno.

Untuk melihat pemikiran Soekarno tentang hubungan Negara dan Islam secara kongkret dan komprehensif, maka peneliti mengupayakan pengumpulan semua karya Soekarno. Dari survey kepustakaan tentang karya-karya Soekarno yang berkaitan dengan hubungan Negara dan Islam, sumber primer yang digunakan diantaranya adalah:

- a. *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta : Panitia di bawah Bendera revolusi, Jilid I, 1964.
  - b. *Pancasila sebagai Dasar Negara*, Jakarta : Idayu-YPS, 1984.
2. Sumber Sekunder

Yang dimaksud dengan sumber sekunder di sini adalah karya-karya para pemikir yang memberi komentar atas pemikiran Soekarno dan karya-karya para pemikir yang sama secara tema dan pembahasan. Karya-karya itu adalah :

- a. Cindy Adams, *Bung karno : Penjambung Lindah Rakyat Indonesia*, terj. Major Abdul Bar Salim, (Jakarta : Gunung Agung, 1966)
- b. Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam : Soekarno Versus Natsir*, (Jakarta : PT Teraju, 2002).
- c. Nazaruddin Sjamsuddin (ed), *Soekarno : Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993).
- d. Benhard Dahm, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, terj. Hasan Basri (Jakarta : LP3ES, 1987).

## **G. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Sebagai suatu penelitian yang bersifat filosofis terhadap pemikir Soekarno tentang hubungan Negara dan Islam, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Karena salah satu ciri khas yang ditonjolkan oleh pendekatan filsafat adalah penelitian dan pengkajian struktrul ide-ide dasar serta pemikiran-pemikiran yang fundamental (*fundamental ideas*) yang dirumuskan oleh seorang pemikir. Sudah barang tentu, factor-faktor lain

seperti factor histories, politik atau teologis ikut andil besar dalam perumusan ide-ide fundamental tersebut, karena dimanapun seorang pemikir berada, ia tak akan bisa melepaskan diri dari bentukan sejarah yang melingkarinya. Dengan kata lain, perumusan struktur “*fundamental ideas*” dan “*conceptual analysis*” adalah cirri khas pendekatan filosofis yang tidak perlu terlalu terganggu oleh factor-faktor sekunder seperti kondisi histories, politis dan geografis.

Metode yang digunakan dalam pencarian data adalah penelitian perpustakaan (*library research*) dengan membaca karya-karya Soekarno sendiri sebagai data primer dan karya-karya lain yang masih ada keterkaitan tema sebagai data sekunder.

Dalam menganalisis data, digunakan analisis (*content analysis*). Analisis ini dimaksudkan untuk melakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam keseluruhan pemikiran Soekarno. Berdasarkan isi yang terkandung dalam pemikiran-pemikiran Soekarno itu kemudian diadakan pengelompokan dengan tahapan identifikasi, klasifikasi, kategorisasi, baru dilakukan interpretasi.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan atau untuk menindak lanjuti penulisan skripsi akan disusun dengan sistematika penyusunan bab perbab. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan: Berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, sumber penelitian, pendekatan dan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- BAB II : Sketsa Kehidupan Soekarno berisi: Dari Blitar hingga ke Bandung, gerakan nasional dan kemerdekaan RI.
- BAB III : Relasi Islam dan Negara dalam perspektif Soekarno berisi: Islam Urusan dunia dan pribadi, tentang Negara Islam, Sekularisme.
- BAB IV : Posisi pemikiran Soekarno berisi: dilihat dari terang Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi dan lain-lain.
- BAB V : Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.